

## **Dampak Penerapan Kebijakan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan Terhadap Stakeholder**

**Indriani Musthopia**

Perencana Muda, Sekretariat BRSDMKP, Kementerian Kelautan Dan Perikanan

<b>Article Info</b>	<b>Abstrak</b>
<p><b>Article history:</b> Received 05 Januari 2022 Publish 08 Januari 2022</p>	<p>Kebijakan dianggap efektif apabila mampu direalisasikan dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah publik yang sering terjadi. Kebijakan yang diambil seharusnya lebih baik dari kebijakan yang diambil dari sebelumnya baik dilihat dari proses, prosedur formal dan isinya. Tujuan dilakukan pengukuran indeks efektivitas kebijakan instansi pemerintah bidang riset dan SDM KP adalah untuk menghitung sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan KKP dalam hal ini adalah BRSDMKP memberikan manfaat kepada stakeholder melalui kegiatan pengukuran teknologi yang direkomendasikan, komoditas rilis dan kebijakan bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Kebijakan dianggap efektif apabila mampu direalisasikan dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah publik yang sering terjadi. Kebijakan yang diambil seharusnya lebih baik dari kebijakan yang diambil dari sebelumnya baik dilihat dari proses, prosedur formal dan isinya. Pengambilan data untuk pengukuran indeks efektivitas bidang SDM dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu wawancara langsung dan melalui penyebaran quesioner melalui google survey. Secara umum hasil pengukuran indeks kebijakan instansi pemerintah bidang Riset dan SDM KP termasuk dalam kategori efektif sehingga masih ada peluang untuk terus ditingkatkan menjadi sangat efektif.</p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Dampak, Penerapan Kebijakan, Sumberdaya Manusia.</i></p>	
<p><b>Info Artikel</b></p>	<p><b>ABSTRACT</b></p>
<p><b>Article history:</b> Diterima 05 Januari 2022 Publis 08 Januari 2022</p>	<p>Abstrak yang dipersiapkan dengan baik memungkinkan pembaca untuk mengidentifikasi konten dasar dokumen dengan cepat dan akurat, untuk menentukan relevansinya dengan minat mereka, dan dengan demikian memutuskan apakah akan membaca dokumen secara keseluruhan. Abstrak harus informatif dan sepenuhnya menjelaskan diri sendiri, memberikan pernyataan yang jelas tentang masalah, pendekatan atau solusi yang diusulkan, dan menunjukkan temuan dan kesimpulan utama. Abstrak harus sepanjang 100 hingga 200 kata. Abstrak harus ditulis dalam bentuk lampau. Nomenklatur standar harus digunakan dan singkatan harus dihindari. Tidak ada literatur yang harus dikutip. Daftar kata kunci memberikan kesempatan untuk menambahkan kata kunci, yang digunakan oleh layanan pengindeksan dan abstraksi, selain yang sudah ada dalam judul. Penggunaan kata kunci yang bijaksana dapat meningkatkan kemudahan bagi pihak yang berkepentingan untuk menemukan artikel kita (10 pt).</p>
	<p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p>
	
<p><b>Corresponding Author:</b> <b>Indriani Musthopia</b> Perencana Muda, Sekretariat BRSDMKP, Kementerian Kelautan Dan Perikanan Email: <a href="mailto:chairinniza@gmail.com">chairinniza@gmail.com</a></p>	

### **1. PENDAHULUAN**

Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) merupakan salah satu unit kerja eselon I KKP yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Salah satu IKU yang harus diukur pencapaian sesuai dengan Keputusan Kepala BRSDMKP No.14/KEP-BRSDMK/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup BRSDMKP Tahun 2017 – 2019 adalah

2280 / *Dampak Penerapan Kebijakan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan Terhadap Stakeholder* (Indriani Musthopia)

Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah Bidang Riset dan SDM KP Menurut keputusan tersebut Efektivitas Kebijakan Pemerintah didefinisikan sebagai keputusan yang diambil oleh KP melalui penerbitan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Pejabat eselon I dapat dilaksanakan dan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Sedangkan Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah yang dimaksud dalam IKU ini adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan KKP dapat diterima oleh stakeholder KP serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

Untuk menjamin efektif tidaknya suatu keputusan yang diambil maka menurut Tahir (2011) perlu memperhatikan apakah kebijakan itu sudah tepat dilakukan dengan mempertimbangkan ketepatan proses pelaksanaan, ketepatan target atau sasaran kebijakan serta memperhatikan kondisi lingkungan yang ada. Selain itu juga dibutuhkan dukungan politik di daerah, dukungan strategis dan dukungan teknis dan kebijakan itu sendiri. Menurut (Akib, 2010) kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut, Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan dianggap efektif apabila mampu direalisasikan dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah publik yang sering terjadi. Kebijakan yang diambil seharusnya lebih baik dari kebijakan yang diambil dari sebelumnya baik dilihat dari proses, prosedur formal dan isinya.

Menurut (Mujianto Solichin, 2015) kebijakan juga merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga/instansi pemerintah yang berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kebijakan BRSDMKP yang diukur terdiri dari bidang riset yang meliputi rekomendasi teknologi dan komoditas rilis karena kedua hal ini dianggap paling berpengaruh terhadap stakeholder khususnya pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan (Edy Yusuf Agunggunanto, 2016). Selain bidang riset, pengukuran juga dilakukan pada kebijakan bidang SDM yang terdiri dari pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Adapun kebijakan yang terpilih untuk diukur antara lain Peti berinsulasi di atas kapal untuk Penanganan TTC, Peningkatan Produksi Udang Windu di Tambak Tradisional Plus dengan Aplikasi Probiotik RICA, Pengolahan Alat Transportasi Ikan Berpendingin untuk Pedagang Ikan Keliling (ALTIS-2), Rilis Udang Galah GI MACRO II dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan.

**2. METODE PENELITIAN**

BRSDMKP memiliki kebijakan khusus untuk menghasilkan rekomendasi teknologi dan menghasilkan komoditas pelepasan/rilis. Kedua produk teknologi yang dihasilkan ini untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dijadikan KEPMEN tentang rekomendasi teknologi dan pelepasan komoditas produk teknologi di masyarakat. Pengambilan data untuk pengukuran indeks efektivitas bidang SDM dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu wawancara langsung dan melalui penyebaran quesioner melalui google survey. Nilai Indeks Efektivitas Kebijakan yang diukur dari Keputusan yang diambil KKP melalui penerbitan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Pejabat Eselon I dapat dilaksanakan dan mampu menyelesaikan masalah yang sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Kebijakan yang akan diukur Indeks Efektivitas Kebijakan Instansi Pemerintah

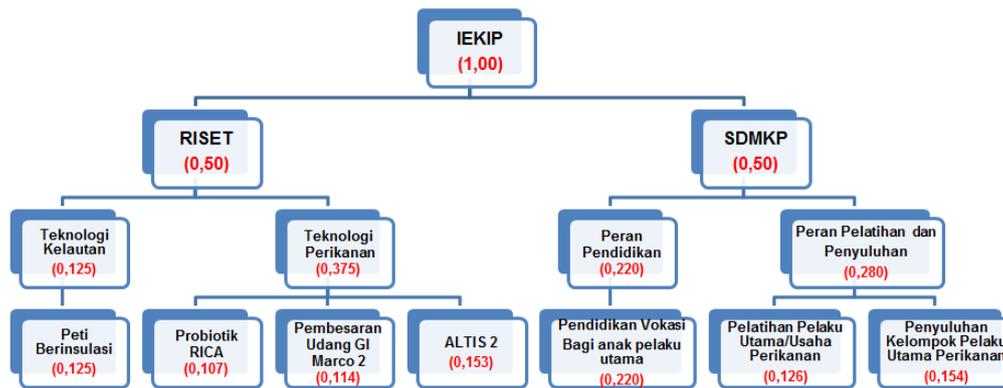
NO	Judul Kebijakan	Lokasi	Dasar Hukum	Kriteria Umum	Pemanfaat Produk
1	Peti berinsulasi di atas kapal untuk Penanganan TTC	Bitung	Kepmen KP No 43 Tahun 2013	• TTC hasil tangkapan nelayan dalam kondisi segar dan berkualitas baik sam pai ditempat pendaratan ikan	• Kelompok nelayan penangkap tuna, tongkol dan cacalang yang telah memiliki kapal sendiri
2	Peningkatan produksi udang windu di tambak	Pinrang, Pangkep	Kepmen KP No 43	• Probiotik Rica Mudah Diproduksi secara mandiri oleh	• Petambak dan Pembudidaya udang

NO	Judul Kebijakan	Lokasi	Dasar Hukum	Kriteria Umum	Pemanfaat Produk
	traditional plus dengan aplikasi probiotik RICA		Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>masyarakat</li> <li>Banyak diadopsi oleh pembudidaya ikan</li> <li>Mampu mengatasi penyakit <i>white spot</i></li> </ul>	
3	Pengolahan Alat Transportasi Ikan Berpendingin untuk Pedagang Ikan Keliling (ALTIS-2)	G. Kidul, Bantul	Kepmen KP No 43 Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alat ini digunakan untuk mendistribusikan/menjual ikan segar ke pembeli sehingga mutu ikan segar tetap terjaga dan mempermudah kegiatan transportasi ikan oleh pedagang ikan keliling menggunakan sepeda motor.</li> <li>Dapat mempertahankan suhu ikan dibawah 5°C selama kegiatan penjualan ikan</li> <li>Mengurangi biaya operasional karena tidak menggunakan es batu</li> <li>Dapat mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama penjualan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedagang ikan segar</li> <li>Konsumen ikan</li> </ul>
4	Rilis Udang Galah GI Macro II	Sleman, Bantul	Kepmen KP No. 23 Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tumbuh lebih cepat 68 % pada karakter bobot dibandingkan dengan pembentuknya</li> <li>ketahanan terhadap penyakit Vibriosis tinggi</li> <li>Sintasan 65% pada uji tantang <i>Vibrio harveyi</i> pada LC50 105 cfu/ml</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit pembenihan rakyat (UPR)</li> <li>Unit pembenihan pemerintah</li> <li>Pengusaha/industri perikanan</li> <li>Petani UGADI (udang galah bersama padi)</li> </ul>
5	Penyelenggaraan Pendidikan vokasi bagi anak pelaku utama	Seluruh Indonesia	PP Nomor 62 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kurikulum satuan pendidikan tinggi di bidang perikanan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang meliputi aspek pengembangan kecerdasan, intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calon peserta didik pada SUPM : lulusan SMP, MTS/ sederajat</li> <li>Calon peserta didik pada AP/STP : lulusan SMU/ sederajat</li> <li>Peserta didik prioritas adalah anak pelaku utama</li> </ul>
6	Pelatihan kepada pelaku utama/usaha	Tegal	PP Nomor 62 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas usaha perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Utama, Pelaku Usaha, calon Pelaku Utama, calon Pelaku Usaha, tenaga kerja, pencari kerja, dan aparatur di bidang perikanan</li> </ul>
7	Penyuluhan kepada pelaku utama/usaha	Tuban	PP Nomor 62 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyuluhan dilakukan kepada pelau utama/usaha berupa uapay pengembangan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaku utama, pelaku usaha yang meliputi kelompok/ lembaga pemerhati perikanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat</li> </ul>

Indeks efektifitas kebijakan diukur dengan 12 pertanyaan terkait kebijakan tersebut yang diajukan kepada responden. Pilihan jawaban dalam skala linear kisaran 1 - 5 dengan polarisasi maksimal. Setelah dilakukan pengukuran skor indikator, kemudian dilakukan skoring dimensi yaitu melakukan penjumlahan dari masing-masing skor indikator. Setelah itu, dibuat interval kelas pada tiap kategori pada masing-masing indikator maupun dimensi. Tahap terakhir, dilakukan penghitungan indeks per dimensi hingga menghasilkan indeks komposit.

Indeks efektivitas merupakan indeks komposit yang diukur secara tertimbang. Dimensi yang dilakukan pengukuran pada rekomendasi teknologi dan rilis yaitu (1) pengguna teknologi, (2) kemudahan teknologi, (3) kelengkapan teknologi, (4) kerumitan teknologi dan (5) dampak teknologi, sedangkan dimensi yang dilakukan pada pengukuran pendidikan vokasi bagi anak

pelaku utama terdiri (1) efektivitas, (2) kecukupan, (3) pemerataan, (4) responsivitas dan (5) ketepatan. Dimensi pengukuran pada pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok pelaku utama/usaha perikanan terdiri dari (1) relevansi, (2) penyelenggaraan, (3) penerapan dan (4) outcome.



Gambar 1. Pembagian Bobot Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah Bidang Riset dan SDM KP

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Indeks Efektivitas Riset

Wawancara dilakukan kepada pengguna teknologi bidang riset terdiri dari peti berinsulasi di atas kapal untuk penanganan TTC, peningkatan produksi udang windu di tambak tradisional plus dengan aplikasi probiotik rica, pengolahan alat transportasi ikan berpendingin untuk pedagang ikan keliling (ALTIS-2) dan rilis Udang Galah GI Macro II dilakukan pada beberapa Kabupaten terpilih tergantung jenis penerapan kebijakana bidang riset. Setelah dilakukan skoring yang dilakukan terhadap penerapan kebijakan bidang riset kemudian dihitung indeks efektivitasnya. Secara keseluruhan, hasil pengukuran indeks bidang riset cukup efektif dengan indeks sebesar 7,954. Hasil pengukuran indeks bidang riset dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Nilai Hasil Pengukuran Indeks Bidang Riset

Indikator	Kebijakan							
	Peti Insulasi		Probiotik Rica		Altis-2		Rilis Udang GI Macro II	
	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
Pengguna Teknologi	7,145	Sesuai	10,000	Sangat sesuai	7,969	Sesuai	6,998	Sesuai
Kemudahan Teknologi	7,762	Mudah	10,000	Sangat mudah	6,060	Mudah	7,125	Mudah
Kelengkapan Teknologi	8,125	Sangat lengkap	10,000	Sangat lengkap	9,771	Sangat lengkap	6,809	Lengkap
Kerumitan Teknologi	6,747	Mudah	9,172	Sangat mudah	7,572	Mudah	6,563	Mudah
Dampak Tenologi	8,868	Sangat meningkat	9,396	Sangat meningkat	7,987	Meningkat	7,262	meningkat
<b>Rata-rata Sub dimensi</b>	7.729	Efektif	9.714	Sangat efektif	7.872	Efektif	6.952	Efektif
<b>Rata-rata Dimensi</b>	7.729	Efektif	8.179					Sangat Efektif
<b>Rata-rata Riset</b>	7.954							<b>Efektif</b>

Lokasi survey untuk kebijakan peti berinsulasi di atas kapal untuk penanganan TTC dilakukan di Kab.Bitung Sulawesi Utara. Hasil survey menunjukkan bahwa penerapan kebijakan peti berinsulasi di atas kapal untuk penanganan TTC di Kab.Bitung dinilai efektif oleh responden dengan indeks sebesar 7.729. Hal ini dikarenakan masyarakat nelayan mampu mengadopsi teknologi peti berinsulasi dalam kegiatan penangkapan ikan khususnya komoditas

TTC dengan mudah dan dinilai sangat cocok diterapkan karena susut hasil terutama susut mutu hasil tangkapan ikan sangat kecil, artinya dengan media yang serupa fungsinya (tidak harus sama), nelayan penangkap ikan TTC sebagai penerima kebijakan dapat menerapkan metode ini. Masyarakat nelayan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan transfer teknologi yang diberikan terutama kelompok nelayan yang menjadi target penerapan teknologi sehingga kebijakan ini dinilai efektif dan berpotensi untuk dikembangkan.

Lokasi survey untuk kebijakan Peningkatan produksi udang windu di tambak traditional plus dengan aplikasi probiotok RICA dilakukan di Kab. Pangkep dan Kab.Pinrang Sulawesi Selatan. Hasil survey menunjukkan bahwa penerapan kebijakan peningkatan produksi udang windu di tambak traditional plus dengan aplikasi probiotok RICA di Kab.Pangkep dan Kab.Pinrang dinilai sangat efektif oleh responden dengan indeks sebesar 9.714. Hal ini dikarenakan petani pembudidaya udang windu sebagai penerima kebijakan dapat dengan mudah mengadopsi teknologi sehingga mampu memproduksi probiotik RICA secara mandiri dengan teknologi yang sudah diberikan.

Lokasi survey untuk kebijakan Pengolahan Alat Transportasi Ikan Berpendingin untuk Pedagang Ikan Keliling (ALTIS-2) dilakukan di Kab.Gunung Kidul dan Kab.Bantul, DI Yogyakarta. Hasil survey menunjukkan bahwa Pengolahan Alat Transportasi Ikan Berpendingin untuk Pedagang Ikan Keliling (ALTIS-2) dinilai Efektif oleh responden dengan indeks sebesar 7.872. Pedagang ikan sebagai penerima kebijakan memberikan respon cukup baik terhadap penerapan kebijakan ini karena alat ini mampu mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama penjualan.

Lokasi survey untuk kebijakan rilis udang GI Macro II dilakukan di Kab.Bantul dan Kab.Sleman. Hasil survey menunjukkan bahwa penerapan kebijakan dinilai efektif oleh responden dengan indeks sebesar 6.952. Hal ini dikarenakan petani pembudidaya udang windu sebagai penerima kebijakan mampu menerapkan teknologi ini dan dianggap teknologi ini cukup menguntungkan dilihat dari waktu pemeliharaannya yang lebih singkat dibandingkan dengan udang galah biasa yaitu memiliki kemampuan tumbuh lebih cepat 68% serta memiliki ketahanan terhadap penyakit vibrosis tinggi.

**Indeks Efektivitas SDM**

Pengambilan data untuk pengukuran indeks efektivitas bidang SDM dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu wawancara langsung dan melalui penyebaran questioner melalui google survey. Kebijakan yang disepakati untuk di ukur terdiri dari 3 dimensi yaitu pendidikan vokasi bagi anak pelaku utama, pelatihan kepada pelaku utama/usaha perikanan dan penyuluhan kepada kelompok pelaku utama/usaha perikanan. Setelah dilakukan skoring terhadap penerapan kebijakan bidang SDM kemudian dihitung indeks efektivitasnya. Secara keseluruhan, hasil pengukuran indeks bidang SDM cukup efektif dengan indeks sebesar 7.833. Hasil pengukuran dimensi SDM dan dimensi pelatihan dan penyuluhan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3.** Nilai Hasil Pengukuran Indeks Bidang SDM

Indikator Pendidikan	Kebijakan Pendidikan Vokasi		Indikator pelatihan dan penyuluhan	Kebijakan Pelatihan		Kebijakan Penyuluhan	
	Indeks	Kategori		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
Efektivitas	8.180	Sangat tercapai	Relevansi	6.262	Sesuai	8.976	Sangat sesuai
Kecukupan	8.004	Sangat tersedia	Penyelenggaraan	6.361	Sesuai	8.471	Sangat sesuai
Perataan	8.477	Lebih dari reguler	Penerapan	6.084	Meningkat	8.686	Sangat meningkat
Responsivitas	8.430	Sangat puas	Outcome	6.006	Mampu	8.489	Sangat mampu
Ketepatan	8.157	Sangat meningkat					
<b>Rata-rata subdimensi</b>	8.250	Sangat efektif		6.178	Efektif	8.655	Efektif
<b>Rata-rata dimensi</b>	8.250	Sangat efektif	7.417		Efektif		
<b>Rata-rata</b>	7.833						<b>Efektif</b>

Indikator Pendidikan	Kebijakan Pendidikan Vokasi		Indikator pelatihan dan penyuluhan	Kebijakan Pelatihan		Kebijakan Penyuluhan	
	Indeks	Kategori		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
SDM							

Survey kebijakan pendidikan vokasi untuk anak pelaku utama dilakukan melalui pengisian questioner google survei. Pemilihan metode ini dengan tujuan untuk menemukan responden yang tepat sesuai dengan tujuan penerapan kebijakan ini. Hasil survei menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan vokasi bagi anak pelaku utama dinilai cukup efektif dengan indeks sebesar 8.250. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberlakuan pendidikan vokasi KP untuk anak pelaku utama telah efektif sehingga mampu menghasilkan kualitas lulusan yang kompeten, inovatif dan kreatif sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri yang terlihat dengan tingginya lulusan yang diterima di dunia kerja. Akan tetapi monitoring penyerapan lulusan satuan pendidikan vokasi KP perlu dilakukan untuk mengathui sejauh mana lulusan yang terserap dalam dunia kerja sejalan dengan rencana strategis organisasi.

Survey kebijakan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap responden di Kabupaten Tegal yang menerima dampak dari pelaksanaan kebijakan ini. Hasil survey menunjukkan bahwa responden dinilai cukup efektif untuk melaksanakan kebijakan ini dengan indeks sebesar 6.178. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan mampu merubah pelaku utama dan pelaku usaha menjadi lebih kompeten dan inovatif sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksinya.

Survey kebijakan penyuluhan bagi pelaku usaha dan pelaku utama dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap responden di Kabupaten Tuban yang menerima dampak dari pelaksanaan kebijakan ini. Hasil survey menunjukkan bahwa responden dinilai cukup efektif untuk melaksanakan kebijakan ini dengan indeks sebesar 8.655. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan menjadikan pelaku utama dan pelaku usaha mampu meningkatkan kemampuannya sehingga memiliki daya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan disamping ini keberhasilan kebijakna ini tidak lepas dari peran serta penyuluh dalam membrikan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

#### 4. KESIMPULAN

Secara umum hasil pengukuran indeks kebijakan instansi pemerintah bidang Riset dan SDM KP termasuk dalam kategori efektif sehingga masih ada peluang untuk terus ditingkatkan menjadi sangat efektif dengan cara :

- Pemilihan kebijakan yang sesuai dengan permintaan stakeholder sehingga dampak dari penerapan kebijakan tersebut bisa benar-benar dirasakan manfaatnya;
- Penentuan lokasi penerapan kebijakan harus dijadikan pertimbangan sehingga kebijkaan yang diterapkan sesuai dengan kepentingan stakeholder;
- Pemilihan responden yang tepat agar informasi yang dapat digali lebih mendalam untuk perbaikan teknologi.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Edy Yusuf Agunggunanto, D. (2016). Strategy of Strengthening Institutional Fishermen Groups for Increasing Income. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 9(2), 311–327. <https://doi.org/10.15294/jejak.v9i2.7632>
- Mujianto Solichin. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi*, 6(2), 148–178.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Tahir, Aripin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Pustaka Indonesia Press.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, KEPMEN KP RI NOMOR 43/KEPMEN-KP/2014 tentang Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2014.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, KEPMEN KP RI NOMOR 23/KEPMEN-KP/2013 tentang Rilis Udang Galah GI Macro II.

Peraturan Pemerintah RI, PP Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.